

Mengelola Lingkungan Hidup

Buruknya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdampak Buruk terhadap Perekonomian dan Masyarakat Miskin

Polusi dan pengelolaan limbah yang buruk membawa dampak negatif yang tinggi terhadap perekonomian Indonesia:

1. Total kerugian ekonomi dari terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, diestimasi, secara konservatif, adalah sebesar **2 persen dari PDB tiap tahunnya**.
2. Biaya yang timbul dari polusi udara terhadap perekonomian Indonesia diperkirakan sekitar 400 juta dollar setiap tahunnya.
3. Biaya yang timbul akibat polusi udara di wilayah Jakarta saja diperkirakan sebanyak 700 juta dollar per tahunnya.

Biaya-biaya ini biasanya lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang berpendapatan rendah karena dua sebab. Pertama, merekalah yang memiliki kemungkinan terbesar terkena dampak dari polusi. Kedua, mereka kurang memiliki kemampuan untuk membiayai pencegahan dan mengatasi dampak polusi itu sendiri.

Permasalahan:

I. KUALITAS AIR MENURUN, SEMENTARA AKSES KE AIR BERSIH DAN SANITASI SANGAT TERBATAS.

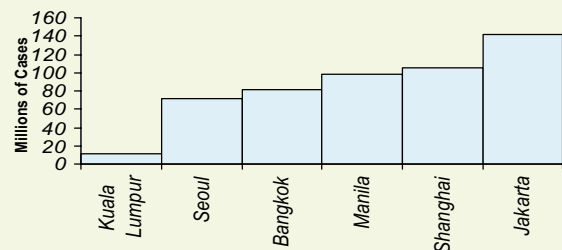
1. Ketersediaan sumber utama air menurun dengan sangat cepat, diakibatkan kurangnya pencarian sumber air tanah yang baru untuk daerah perkotaan dan meningkatnya polusi terhadap air permukaan dan air tanah. Penyediaan air bersih olahan terhambat oleh memburuknya jaringan distribusi dan pelayanan yang tidak tepat waktu.
2. Indonesia memiliki cakupan yang rendah untuk air bersih dan sanitasi di daerahnya: sekitar 43 juta penduduk tetap tidak memiliki akses kepada

3. air bersih, dimana 30 juta penduduk tersebut berada di Pulau Jawa. Hanya setengah dari populasi memiliki tempat sanitasi yang memadai. Bandung, Cirebon, Jakarta, Medan, Surakarta, dan Yogyakarta memiliki sistem pembuangan limbah yang terbatas, tetapi hanya dapat melayani 2-3 persen penduduknya. Sisanya, termasuk sebagian besar kaum miskin perkotaan, tergantung kepada fasilitas-fasilitas komunal dan jalur air. Mereka umumnya rentan terhadap resiko kesehatan.

II. KUALITAS UDARA YANG BURUK, BERAKIBAT PADA MENINGKATNYA MASALAH KESEHATAN DAN RENDAHNYA PRODUKTIVITAS.

1. Kualitas udara terus menurun. Jakarta memiliki tingkat CO2 dan zat penyebab polusi lainnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Asia. Efeknya terhadap kesehatan sangat besar dibandingkan dengan kota lainnya di Asia. (Gambar 1)

Gambar 1. Gangguan Pernapasan di Asia



Sumber: Indonesia Environment Monitor 2003

2. Bahan bakar timbal dilarang di Jakarta sejak tahun 2001, tetapi tetap memiliki ancaman yang besar terhadap kesehatan di daerah lain di Indonesia.

III. PRODUKSI LIMBAH PADAT TERUS MENINGKAT DAN BERDAMPAK TERHADAP AIR DAN KUALITAS UDARA.

1. Produksi limbah padat naik secara signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2000, Jakarta saja menghasilkan 24.000 m³ sampah per hari, yang diperkirakan akan berlipat ganda hingga tahun 2010. (Tabel 1)
2. Hanya sekitar 50 persen dari limbah padat yang dikumpulkan untuk dibuang ke tempat pembuangan. Daerah-daerah miskin di perkotaan secara umum dilayani secara setengah-setengah atau justru tidak dilayani sama sekali. Di Indonesia, sekitar 15-20 persen dari limbah dibuang secara baik dan tepat; sisanya dibuang di sungai dan kali, menciptakan masalah banjir. Diperkirakan 85 persen dari kota-kota kecil dan lebih dari 50 persen kota berukuran menengah secara resmi membuang limbah mereka di tempat-tempat terbuka.
3. Sekitar 75 persen dari limbah perkotaan dapat terurai dan dapat digunakan sebagai kompos atau biogas. Namun, kurangnya pengetahuan dan pelatihan menghambat pengembangan lebih jauh dari pengelolaan limbah yang produktif semacam itu. Walaupun adanya pasar yang relatif besar untuk produk-produk daur ulang, hanya sebagian kecil dari limbah tersebut yang didaurulang.

Tabel 1. Limbah Padat yang Dihasilkan di sejumlah Kota di Indonesia, 2000

Kota	Limbah yang dihasilkan (m ³ /hari)	Limbah harian yang dihasilkan tiap orang (kg/orang/hari)
Jakarta, Jawa	24,025	0.66
Bandung, Jawa	6,862	0.70
Semarang, Jawa	3,215	0.69
Yogyakarta, Jawa	1,240	0.78
Padang, Sumatra	1,922	0.90
Ujung Pandang, Sulawesi	2,424	0.86

Source: Indonesia Environment Monitor 2003

IV. POLUSI INDUSTRI KIAN MENGANCAM

1. Perbaikan dalam kondisi perekonomian menyebabkan jumlah produk hasil industri terus bertambah. Walaupun terjadi penurunan dalam intensitas polusi karena adanya pergeseran dari industri pengolahan ke industri perakitan, tingkat polusi di masa depan kelihatannya tetap akan meningkat.
2. Dampak kesehatan dari polusi industri terkonsentrasi pada daerah perkotaan dan di propinsi-propinsi yang memiliki populasi yang padat. Porsi dari zat beracun di Jawa saja, misalnya, akan tetap konstan sampai tahun 2020 dan 85 persennya akan terkonsentrasi pada daerah-daerah perkotaan. Ditambah lagi, fokus perlu dipertahankan pada industri yang berlokasi pada daerah terpencil dan pengaruhnya terbatas kepada ekosistem masyarakat lokal.

V. MASALAH-MASALAH TERSEBUT TIMBUL KARENA LEMAHNYA KERANGKA SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

1. Kerangka administratif dan perundang-undangan Indonesia masih tidak cukup untuk memenuhi terwujudnya pembangunan yang mempertimbangkan kesinambungan lingkungan hidup. Hukum dan aturan perundangan dilaksanakan dengan penekanan pada eksploitasi bukan pada konservasi dan perlindungan. Lembaga-lembaga lingkungan sangat terfragmentasi. Peran, tanggung-jawab, dan mekanisme koordinasi pada tingkat nasional dan daerah, misalnya, tidak digariskan dengan baik, sementara ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi juga sangat terbatas. Hal-hal ini menimbulkan hambatan yang signifikan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara efektif.
2. Tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, masih sangat rendah. Pengambilan keputusan dalam berbagai rencana pembangunan tidak secara penuh meminta pendapat publik dan sering kali tidak transparan. Dalam lima tahun terakhir, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan LSM-LSM telah lebih berani dalam menyuarakan perlindungan lingkungan yang lebih besar dan pengelolaan yang lebih baik dalam sumber daya alam. Namun, kesadaran dalam berpolitik dan keaktifan dari masyarakat sipil belum dapat menciptakan momentum yang cukup untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang secara aktif mendorong partisipasi yang lebih luas dari penduduk setempat dalam mengelola lingkungan mereka.

Menuju Pengelolaan Lingkungan yang Lebih Baik

I. MENJADIKAN PEMBERIAN AIR BERSIH DAN SANITASI SEBAGAI PRIORITAS INVESTASI

Meningkatkan akses air bersih. Hal ini sebaiknya difokuskan untuk meningkatkan akses penduduk miskin terhadap ketersediaan air minum, termasuk sumur dan penampungan air hujan, dibarengi dengan ekspansi ketersediaan air ledeng. Selain dengan memperluas jaringan distribusi, banyak kota dapat meningkatkan persediaan air yang telah diolah secara signifikan, dengan mengurangi air yang tidak terpakai di dalam sistem yang telah ada, melalui operasi dan perawatan yang lebih baik. Di banyak perkotaan, ada kebutuhan yang tinggi untuk memperbaiki kinerja lembaga-lembaga yang menangani pipa-pipa saluran air bersih, seperti PDAM. Sedangkan di pedesaan, kerangka kebijakan untuk pelayanan air bersih dan sanitasi yang dikelola oleh komunitas setempat harus segera diselesaikan dan dilaksanakan.

Memperbaiki ketersediaan sistem pembuangan limbah dan pelayanan sanitasi. Perencanaan sanitasi yang strategis harus berlanjut sehingga solusi teknis dengan biaya paling minimal dapat dihasilkan. Ini harus sejalan dengan solusi dalam hal pendanaan, revitalisasi dari biaya dan manajemen dari sistem yang digunakan. Kemudian dapat diikuti dengan investasi yang serius dalam memperbaiki fasilitas pembuangan setempat dan jika memungkinkan, membangun sistem pembuangan serta fasilitas pengolahan limbah.

¹ Lihat the World Bank Policy Briefing on Infrastructure untuk lebih jelasnya

Mengelola sumber daya air. Pengaturan kelembagaan perlu untuk dikembangkan atau diperkuat dalam mengelola sumber daya air (air tanah dan permukaan), tentunya dengan batas-batas yang jelas. Penetapan harga yang lebih baik serta adanya kebijakan revitalisasi biaya sangatlah diperlukan tidak hanya dalam mengelola permintaan, tetapi juga untuk mendanai investasi tambahan dalam penyediaan air, irigasi, dan sanitasi.

I. CARI DAN DUKUNG PELUANG-PELUANG YANG EFEKTIF DAN BERBIAYA RENDAH UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS UDARA.

Mengurangi kepadatan lalu-lintas dan emisi kendaraan. Mengurangi tumbuhnya kepadatan lalu-lintas merupakan hal penting dalam melindungi kesehatan penduduk perkotaan, selain meningkatkan efisiensi ekonomi. Integrasi dari perencanaan penggunaan lahan dan perencanaan transportasi, pengelolaan dan pembangunan lalu-lintas yang lebih baik, standar teknis yang lebih tinggi untuk kendaraan bermotor, serta perluasan jaringan transportasi publik yang memadai, merupakan solusi bagi permasalahan ini. Berbagai kebijakan yang mengelola sisi permintaan juga harus dilaksanakan. Emisi dapat dikurangi melalui penenaan pajak BBM yang dihitung berdasarkan polusi, pengurangan bertahap penggunaan bahan bakar tanpa timbal dalam skala nasional dan promosi bahan bakar yang ramah lingkungan; seperti CNG dan bio-diesel.

Libatkan sektor swasta dalam pengurangan efek gas rumah kaca. Polusi udara memiliki dimensi global dan, karena Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto, maka Indonesia dapat mengakses pendanaan dari dana-dana yang disediakan oleh Clean Development Mechanism. Kredit-kredit pengurangan emisi karbon memberikan insentif tambahan bagi industri-industri dan kota-kota untuk berinvestasi dalam efisiensi energi, pengembangan energi yang dapat diperbarui dan peluang-peluang lainnya untuk mengurangi emisi gas-gas rumah kaca.

III. MEMBANTU PEMERINTAHAN DAERAH MENGATASI MASALAH PENGELOLAAN LIMBAH PADAT.

Pengumpulan sampah sangat penting, terutama di daerah-daerah miskin, dengan pengoleksi sampah utama dikelola oleh penduduk lokal. Partisipasi dari sektor swasta yang dikelola dengan baik, bekerja sama dengan penduduk sekitar dan pelibatan partisipasi pemulung, dapat memperbaiki efisiensi dan menurunkan biaya. Dukungan publik dan swasta diperlukan dalam menciptakan peningkatan dari proses daur ulang, selain membantu perbaikan sumber daya dan pengurangan bahan-bahan yang dibuang ke jalur limbah. Dari sisi pembuangan, tambahan investasi dibutuhkan untuk mengawasi dan mengelola lahan-lahan sanitasi, pembuatan kompos dan emisi metana, yang juga dapat menjadi sumber pendapatan.

IV. MENGURANGI DAN MENGHINDARI POLUSI INDUSTRI

Membersihkan polusi dari perusahaan-perusahaan yang ada. Ini termasuk: a) menjalankan kebijakan penetapan harga yang berdasarkan pasar, dan tidak disubsidi, terhadap penggunaan sumber-sumber daya alam dan penggunaan jasa-jasa pelayanan perkotaan; b) menetapkan target pengendalian polusi bagi industri, polutan, dan area, dengan cara memberikan perhatian pada penyebab polusi tertinggi dan polutan yang paling merusak, di berbagai area yang kondisinya paling terancam; c) melanjutkan penguatan kapasitas kelembagaan untuk memonitor polusi dan pelaksanaan standar-standar yang telah

ditetapkan, terutama pada tingkatan lokal; d) mendorong pengadopsian teknologi-teknologi yang aman dan skema-skema yang meminimalisir limbah; e) memperluas peran informasi publik, seperti merevitalisasi sistem PROPER dalam rangka membangun konsensus, mendapatkan perhatian tokoh-tokoh bisnis dan industri, serta memberikan tekanan publik terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak responsif; dan f) menjalankan rencana-rencana untuk mengendalikan limbah beracun dan berbahaya, termasuk dalam penyimpanan, transportasi, dan masalah perawatan.

Mengurangi kadar polusi perusahaan-perusahaan baru dan yang sedang melebarkan sayap. Ini termasuk: a) mereformasi prosedur AMDAL agar lebih efektif dan memberikan kekuatan dalam pelaksanaan prosedur pencegahan; b) termasuk juga penerapan teknologi dalam penilaian AMDAL, yang lebih mendukung penerapan teknologi-teknologi yang efisien dan minim polusi; c) menjamin tersedianya fasilitas pengolahan limbah akhir di perusahaan-perusahaan baru dan yang sedang berkembang; d) memperkuat partisipasi pemerintah daerah dalam berbagai proyek besar, terutama yang berhubungan dengan masalah lokasi dan pengendalian polusi.

V. MEREFORMASI SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Memperkuat desentralisasi pengelolaan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) harus berkonsentrasi pada pembuatan kerangka kebijakan-kebijakan lingkungan, memimpin transfer fungsi-fungsi lingkungan ke pemerintah daerah, memobilisasi sumber-sumber dana untuk menjawab tantangan pengelolaan lingkungan pada tingkat daerah, serta mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah membutuhkan bantuan dalam membangun kemampuan mereka dalam hal pengelolaan lingkungan, termasuk pengawasan yang lebih baik, mekanisme pelaksanaan, memperbaiki prosedur AMDAL, pemberian ijin yang terkait dengan masalah lingkungan, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang tersedia.

Mengoptimalkan peran pihak terkait. Sebagai tambahan dari memodernisasi peraturan dan prosedur, KLH beserta pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lain yang terkait harus mempromosikan partisipasi publik, serta memperkuat program-program yang melengkapi sistem kewenangan dan peraturan yang ada. Juga dapat diciptakan keadaan yang memungkinkan peran sektor swasta secara lebih besar dalam mengelola lingkungan. Didalamnya termasuk pembuatan program-program yang memungkinkan masyarakat sipil dan komunitas lokal menjadi rekan dalam pengawasan, menyediakan pendidikan lingkungan pada tingkatan akar rumput, dan memfasilitasi penerimaan kebijakan lingkungan melalui dialog multi pihak.

Pengelolaan lingkungan secara konvensional. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan berada pada KLH di tingkat nasional dan, saat ini juga oleh badan-badan pengelolaan lingkungan di daerah-daerah. Namun, investasi terbesar dan keputusan kebijakan yang mempengaruhi kualitas lingkungan justru dibuat oleh badan-badan pemerintahan yang lain, seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Transportasi, Departemen Kehutanan, dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan lingkungan dan prosedur-prosedur dari berbagai pihak ini membutuhkan penguatan dan juga koordinasi diantara mereka, terutama terhadap dampak investasi dan kebijakan berskala besar.

Daerah Rawan Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia



Sumber: Indonesia Environment Monitor 2003

Indonesia policy Briefs | Ide-Ide Program 100 Hari

DAFTAR ISI

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Kemiskinan | 7. Reformasi Sektor Hukum | 13. Pangan Untuk Indonesia |
| 2. Menciptakan Lapangan Kerja | 8. Desentralisasi | 14. Mengelola Lingkungan Hidup |
| 3. Iklim Penanaman Modal | 9. Sektor Keuangan | 15. Kehutanan |
| 4. Memulihkan Daya Saing | 10. Kredit Untuk Penduduk Miskin | 16. Pengembangan UKM |
| 5. Infrastruktur | 11. Pendidikan | 17. Pertambangan |
| 6. Korupsi | 12. Kesehatan | 18. Reformasi di Bidang Kepegawaian Negeri |